ABSTRAK

Muhammad Hanip, 12103183068, Respon Masyarakat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penangulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Studi Kasus Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Ladin, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Masyarakat, Vaksinasi, COVID-19

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kebijakan pemerintah terkait cara penanggulangan COVID-19 yaitu vaksinasi. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Vaksinasi COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari paparan COVID-19 seharusnya dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang tidak mau melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)?, 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)?, 3) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap respon masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sebagian besar masyarakat masih belum memahami akan pentingnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa masyarakat mengikuti vaksin karena hanya mengikuti peraturan yang ada bahkan ada juga yang terpaksa karena pekerjaan. Selain itu masih terdapat masyarakat yang tidak mau

mendapatkkan vaksin COVID-19 karena takut, memiliki penyakit bawaan, bahkan ada yang tidak percaya akan COVID-19. 2) Himbauan tentang pemberian vaksin untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat khususnya di Desa Sambirobyong. Sekitar 70% warga Desa Sambirobyong menghendaki dan mengikuti vaksinasi COVID-19. Sedangkan 30% warga tidak menghendaki vaksinasi COVID-19. Masyarakat Desa Sambirobyong yang menghendaki mengikuti vaksin dikarenakan mereka mengikuti anjuran pemerintah, karena menganggap apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu adalah hal baik yang harus dilakukan. Tidak sedikit pula yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 karena terpaksa keadaan. Faktor penyebab utama keengganan masyarakat melakukan vaksinasi, yaitu dikarenakan kurangnya edukasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sehingga masyarakat tidak mengerti akan pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Faktor lain, yaitu memiliki penyakit bawaan yang tidak boleh diberi vaksin COVID-19. Adapula masyarakat yang takut akan efek samping dari vaksin tersebut, apalagi banyaknya berita yang beredar tentang kasus kematian setelah diberikan vaksin COVID-19. Selain itu, ada beberapa msyarakat yang menanggap bahwa vaksin hanya untuk keperluan administrasi, seperti pengambilan bantuan, bepergian, memasuki tempat-tempat umum, dan lain sebagainya. 3) Pemberian vaksin COVID-19 boleh dilakukan, karena vaksin adalah salah satu obat yang dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Kemudian dalam surat an-Nisa ayat 102 dijelaskan bahwa berobat dan menjaga diri dari wabah penyakit hukumnya wajib. Selain itu, dalam Q.S. an-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwa sebagai umat muslim harus menaati perintah Allah, Rasul, dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan). Sehingga sebagai umat muslim, wajib hukumnya berobat dan menjaga diri dari paparan virus COVID-19 dengan cara melaksanakan apa yang telah dihimbau oleh pemerintah (Ulil Amri) terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

ABSTRACT

Muhammad Hanip, 12103183068, Public Response to the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Overcoming the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic (Case Study of Sambirobyong Village, Sumbergempol District), Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung State Islamic University, 2023, Supervisor: Ladin, S.H.I., M.H.

Keywords: Community, Vaccination, COVID-19

This research is motivated by the existence of government policies related to how to overcome COVID-19, namely vaccination. This is stated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Overcoming the *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Pandemic. The COVID-19 vaccination recommended by the government which aims to protect the public from exposure to COVID-19 should be carried out by the entire community, but in reality there are still people who do not want to carry out the COVID-19 vaccination.

The formulation of the problems in this study is: 1) How is the public's understanding of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Overcoming the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic?, 2) How is the public response to the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Overcoming the Coronavirus Disease Pandemic 2019 (COVID-19)?, 3) What is the fiqh siyasah review of the community's response in implementing the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Overcoming the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic?

This research uses qualitative methods and is a type of empirical legal research with a sociological approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, drawing conclusions. As for checking the validity of the data using triangulation.

The results of this study show that: 1) Most people still do not understand the importance of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Overcoming the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. This can be seen from the results of interviews that people follow the vaccine

because they only follow existing regulations and some are even forced to because of work. In addition, there are still people who do not want to get the COVID-19 vaccine because they are afraid, have congenital diseases, and some even do not believe in COVID-19. 2) Appeals about administering vaccines to overcome the spread of COVID-19 have received various responses from the community, especially in Sambirobyong Village. Around 70% of the residents of Sambirobyong Village want and take part in the COVID-19 vaccination. Meanwhile, 30% of residents do not want to be vaccinated against COVID-19. The people of Sambirobyong Village who want to take the vaccine because they follow the government's recommendations, because they think what the government ordered is a good thing to do. Not a few also carry out the COVID-19 vaccination because of forced circumstances. The main factor causing the reluctance of the community to vaccinate is due to the lack of education to the public regarding the implementation of the COVID-19 vaccination, so that the public does not understand the importance of this COVID-19 vaccination. Another factor, which is having a congenital disease that should not be given the COVID-19 vaccine. There are also people who are afraid of the side effects of the vaccine, especially the many news circulating about death cases after being given the COVID-19 vaccine. In addition, there are some people who think that vaccines are only for administrative purposes, such as taking assistance, traveling, entering public places, and so on. 3) Administration of the COVID-19 vaccine is okay, because the vaccine is one of the drugs that can prevent the spread of the COVID-19 virus. Then in sura an-Nisa verse 102 it is explained thatbah wa treatment and guarding against the plague of the disease is legally mandatory. In addition, in Q.S. an-Nisa verse 59 it is explained bahwa as muslims must obey the commands of Allah, the Messenger, and Ulil Amri (holders of power). So that as Muslims, it is legally obligatory to seek treatment and protect themselves from exposure to COVID-19 virus by carrying out what the government (Ulil Amri) has urged regarding the implementation of the COVID-19 vaccination.

محمد حنيب ، ١٢١٠٣١٨٣٠٦٨ ، استجابة الجمهور للائحة وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ التطعيم في سياق التغلب على جائحة *مرض فيروس كورونا* ٢٠١٩ (كوفيد-١٩) (دراسة حالة قرية سامبيروبيونغ ، مقاطعة سومبيرجمبول) ، قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة والعلوم القانونية ، جامعة السيد علي رحمة الله تولونجاجونج الإسلامية الحكومية ، ٢٠٢٣ ، المشرف: لادن ، S.H.I.، M.H.

الكلمات المفتاحية: المجتمع ، التطعيم ، كوفيد-١٩

الدافع وراء هذا البحث هو وجود سياسات حكومية تتعلق بكيفية التغلب على كوفيد-١٩، أي التطعيم. جاء ذلك في لائحة وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ التطعيم في سياق التغلب على جائحة *مرض فيروس كورونا* ٢٠١٩ (كوفيد-١٩). يجب أن يتم التطعيم ضد كوفيد-١٩ الذي أوصت به الحكومة والذي يهدف إلى حماية الجمهور من التعرض ل كوفيد-١٩ من قبل المجتمع بأكمله ، ولكن في الواقع لا يزال هناك أشخاص لا يريدون إجراء لقاح كوفيد-١٩.

صياغة المشاكل في هذه الدراسة هي: ١) كيف يتم فهم الجمهور للائحة وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ التطعيم في سياق التغلب على جائحة مرض فيروس كورونا ٢٠١٩ (كوفيد-١٩)؟, ٢) كيف يتم الرد العام على لائحة وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ التطعيم في سياق التغلب على جائحة *مرض فيروس كورونا* ٢٠١٩ (كوفيد-١٩)؟, ٣) ما هي مراجعة *الفقه الاستجابة* المجتمع في تنفيذ لائحة وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنفيذ التطعيم في سياق التغلب على *جائحة مرض فيروس كورونا* ٢٠١٩ (كوفيد-١٩)؟

يستخدم هذا البحث أساليب نوعية وهو نوع من البحث القانوني التجريبي مع نهج اجتماعي. تقنيات جمع البيانات في شكل الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تستخدم تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. أما بالنسبة للتحقق من صحة البيانات باستخدام التثليث.

تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: ١) لا يزال معظم الناس لا يفهمون أهمية لائحة وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ بشأن تنفيذ التطعيم في سياق التغلب على جائحة *مرض فيروس كورونا* ٢٠١٩ (كوفيد-١٩). يمكن ملاحظة ذلك من نتائج المقابلات التي يتبعها الناس لأنهم يتبعون فقط اللوائح الحالية وبعضهم مجبرون على ذلك بسبب العمل. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال هناك أشخاص لا يرغبون في الحصول على لقاح كوفيد-١٩ لأنهم خائفون ومصابون بأمراض خلقية ، وبعضهم لا يؤمنون ب كوفيد-١٩. ٢) تلقت النداءات حول إعطاء اللقاحات للتغلب على انتشار كوفيد-١٩ استجابات مختلفة من المجتمع ، وخاصة في قرية سامبيروبيونغ. حوالي ٧٠٪ من سكان قرية

سامبيروبيونغ يريدون ويشاركون في التطعيم ضد كوفيد-١٩. وفي الوقت نفسه ، لا يرغب ٣٠٪ من السكان في التطعيم ضد كوفيد-١٩. سكان قرية سامبيروبيونغ الذين يريدون أخذ اللقاح لأنهم يتبعون توصيات الحكومة ، لأنهم يعتقدون أن ما أمرت به الحكومة هو شيء جيد للقيام به. كما يقوم عدد ليس بقليل منهم بالتطعيم ضد كوفيد-١٩ بسبب الظروف القسرية. يرجع العامل الرئيسي الذي يسبب إحجام المجتمع عن التطعيم إلى نقص التثقيف للجمهور فيما يتعلق بتنفيذ لقاح كوفيد-١٩ ، بحيث لا يفهم الجمهور أهمية هذا التطعيم ضد كوفيد-١٩. عامل آخر ، وهو وجود مرض خلقي لا ينبغي إعطاؤه لقاح كوفيد-١٩. هناك أيضا أشخاص يخافون من الآثار الجانبية للقاح، خاصة الأخبار الكثيرة المتداولة حول حالات الوفاة بعد إعطائهم لقاح كوفيد-١٩. بالإضافة إلى ذلك ، هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن اللقاحات هي فقط لأغراض إدارية ، مثل أخذ المساعدة والسفر ودخول الأماكن العامة وما إلى ذلك. ٣) لا بأس من إعطاء لقاح كوفيد-١٩ ، لأن اللقاح هو أحد الأدوية التي يمكن أن تمنع انتشار فيروس كوفيد-١٩. ثم في سورة النساء الآية ١٠٢ يوضح أنعلاج البهاء والوقاية من طاعون المرض إلزامي قانونا. بالإضافة إلى ذلك ، في Q.S. النيةسا الآية ٥٩ يتم شرحه باهوا حيث يجب على المسلمين إطاعة أوامر الله والرسول وأوليل عمري (أصحاب السلطة). لذلك كمسلمين ، من الواجب قانونا طلب العلاج وحماية أنفسهم من التعرض لفيروس كوفيد-١٩ من خلال تنفيذ ما حثت عليه الحكومة (اولى الامر) فيما يتعلق بتنفيذ التطعيم ضد كوفيد-١٩.